

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Danau Seluluk merupakan kecamatan pemekaran baru dari Kecamatan Seruyan Tengah di Kabupaten Seruyan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 04 Tahun 2008 tanggal 14 Januari 2008 dan tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 16 Seri D tertanggal 14 Januari 2008 dengan ibukota Asam Baru. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 39 Tahun 2010, baru sepuluh kecamatan yang sudah berjalan atau beroperasi di Kabupaten Seruyan yaitu Danau Seluluk, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah, dan Seruyan Hulu, Seruyan Raya, Danau SelulukTimur, Danau Seluluk, Batu Ampar, dan Suling Tambun. Sedangkan empat kecamatan yang belum berjalan/operasional di Kabupaten Seruyan, yaitu: Kecamatan Sembuluh Raya, Natai Kelampai, Sepan Biha, dan Seruyan Hulu Utara.

1. Administrasi

Wilayah Kecamatan Danau Seluluk dibelah oleh sungai seruyan yang mengalir dari utara menuju keselatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

Utara : Kecamatan Seruyan Tengah dan Kecamatan Batu Ampar
Timur : Kabupaten Kotawaringin Timur
Selatan : Kecamatan Seruyan Raya dan Kecamatan Hanau
Barat : Kabupaten Kotawaingin Barat

Kecamatan Danau Seluluk secara administrasi terdiri dari 6 (Enam) desa yaitu :

- 1) Desa Asam Baru
- 2) Desa Rungau Raya
- 3) Desa Tanjung Hara

- 4) Desa Tanjung Paring
- 5) Desa Panimba Raya
- 6) Desa Tanjung Rangas II

Luas Kecamatan Danau Seluluk adalah $\pm 586 \text{ km}^2$ meliputi beberapa bagian hutan, rawa, sungai, danau dan genangan serta pertanahan lainnya.

Jumlah penduduk Kecamatan Danau Seluluk sesuai sensus data statistik tahun 2013 adalah 19.650 jiwa dengan tingkat kepadatan 11,21 jiwa / km^2 dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 33,53 % pertahun.

Luas wilayah Kecamatan Danau Seluluk perdesa Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Nama Desa	Luas (Km^2)	% terhadap luas Kecamatan Danau Seluluk
(1)	(2)	(3)
1. Asam Baru	80	13,65
2. Rungau Raya	168	28,66
3. Tanjung Hara	70	11,94
4. Tanjung Paring	91	15,52
5. Panimba Raya	70	11,94
6. Tanjung Rangas II	107	18,25
Jumlah Luas Kec. Danau Seluluk	586	100

Sumber : Seksi Pemerintahan Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2021

Luas Kecamatan Danau Seluluk adalah 586 km^2 meliputi beberapa bagian hutan, rawa, sungai, danau dan genangan serta pertanahan lainnya.

2. Topografis dan Geografis

Kecamatan Danau Seluluk dengan ibu kota kecamatan adalah Asam Baru terletak dibagian utara dari Kabupaten Seruyan secara topografis dan geografis merupakan daerah berbukit dan jenis tanah yang mendominasi adalah tanah jenis podsolik merah kuning walaupun disebagian wilayah terdapat jenis tanah lainnya seperti alluvial, organosol, lithosol dan sebagainya. Wilayah Kecamatan Danau Seluluk merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata 20 – 500 m diatas permukaan laut dan kemiringan 15 – 40°.

3. Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Danau Seluluk sesuai sensus data statistik tahun 2017 adalah 20.784 jiwa dengan tingkat kepadatan ± 35.47 jiwa / km² dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 6,455 % pertahun.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok Kecamatan Danau Seluluk

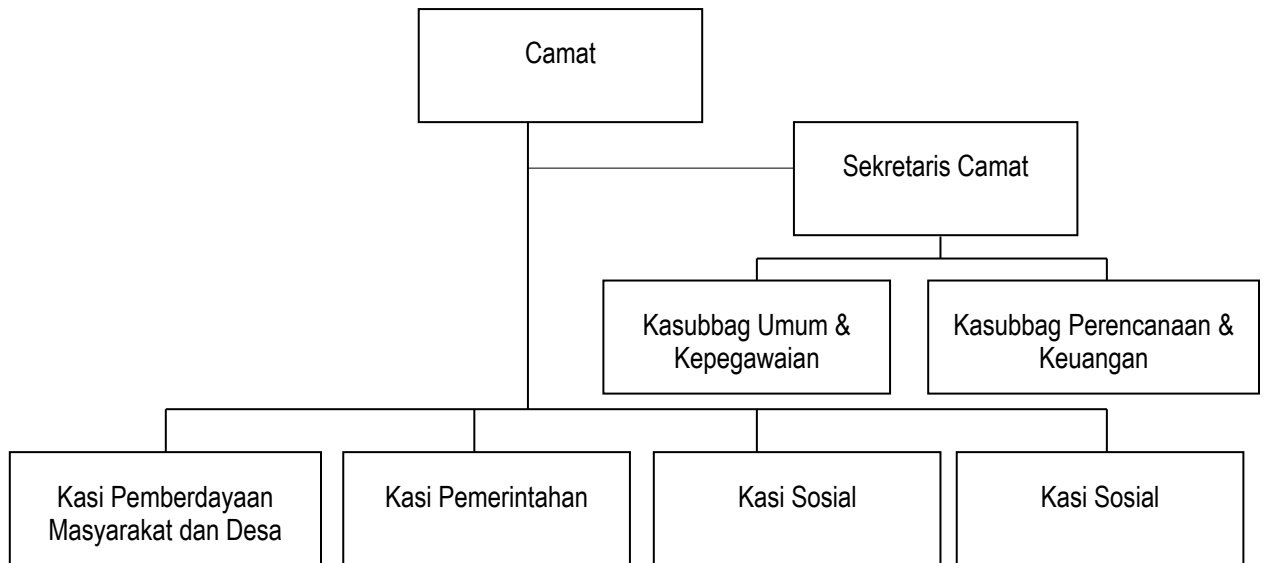
Tugas pokok dari Kecamatan adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan.

b. Fungsi Kecamatan Danau Seluluk

- a. Menyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah umum, pembinaan pertahanan, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- b. Membina desa serta ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Membina pembangunan masyarakat kelurahan, desa meliputi pembinaan perekonomian dan produksi, pembinaan pembangunan dan lingkungan hidup, pembinaan pemberdayaan perempuan.
- d. Membina kesejahteraan sosial.
- e. Menyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
- f. Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di daerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Seruyan Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan menyebutkan bahwa Susunan dan Organisasi dari Kecamatan adalah sebagai berikut :



Tugas Pokok dan Fungsinya tiap bagian/seksi adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat berdasarkan pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan Otonomi Daerah.
- b. Melaksanakan tugas–tugas lain yang dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- h. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; dan
- i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

- j. Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat didaerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. melakukan pembinaan aserta memberikan dukungan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan.
- b. Menyusun perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- d. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

1. Melaksanakan pelayanan umum urusan rumah tangga dan perlengkapan.
1. Melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian.
3. Sebagai pengelola urusan rumah tangga.
4. Sebagai pengelola urusan perjalanan dinas
5. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
6. Sebagai pengelola administrasi ketatausahaan dan kepegawaian.
7. Pengaturan agenda rapat.
8. Pengadministrasian kegiatan organisasi.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
2. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data.
3. Perancangan dan penyusunan program kegiatan.
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program.
5. Melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan serta pembukuan dan tata usaha keuangan.
6. Penyusunan anggaran
7. Pengelolaan perbendaharaan.
8. Pengelolaan tata usaha keuangan.
9. Pembukuan dan verifikasi.

10. Menyusun laporan keuangan.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang Pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan.
2. Melakukan penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan produksi.
3. Melakukan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
4. Melakukan pembinaan pembangunan dan pengendalian lingkungan hidup.

4. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa/kelurahan.
2. Melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
3. Melakukan pembinaan pemerintahan desa / kelurahan.
4. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan.

5. Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Pelayanan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dibidang pelayanan sosial kepada masyarakat yang mempunyai tugas :

1. Melakukan pelayanan urusan sosial dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan pelayanan bantuan sosial.
3. Melakukan pembinaan kepemudaan.
4. Melakukan pembinaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
5. Melakukan pembinaan kehidupan beragama.
6. Melakukan pembinaan pendidikan dan kebudayaan.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas :

1. Melaksanakan, menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

2. Melakukan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Melakukan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan.
4. Melakukan pembinaan perijinan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang di perhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan eksternal (Peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Merujuk pada Visi dan Misi Bupati Seruyan Tahun 2025-2029. Visi Yaitu "Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah Untuk Semua" dan Kecamatan Danau Seluluk masuk di Misi III "Mewujudkan Inovasi Layanan Publik Dan Kemandirian Desa". Sehingga Tujuan Renstra Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025 - 2029 adalah "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan efisien".

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan

a. Tujuan

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan dari proses pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan Pelayanan Publik, salah satu upayanya adalah peningkatan Pelayanan Paten untuk kurun waktu 5 (Lima) tahun, dari Tahun 2025 sampai Tahun 2029.

Tujuan adalah hal yang ingin dicapai Perangkat Daerah terkait program yang dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, adapun Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Danau Seluluk dalam pelaksanaan program kegiatan terkait dengan rencana strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

b. Sasaran

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Danau Seluluk maka diharapkan Tahun 2025-2029 tercapai sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Perangkat Daerah dengan indikator sasaran adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
2. Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2024 (Baseline)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						Ke					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(09)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			88,05	88,06	88,07	88,08	88,09	88,10	88,11
			Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	16,80	27,75	40,75	41,75	42,75	43,75	44,75

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2024 (Baseline)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
						Ke					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(09)	(10)	(11)
			h								
			Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	33,33	80%	82%	84%	85%	87%	88%

B. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan yang ditempuh, yaitu :

1. Pengembangan transparansi informasi publik berbasis IT dalam rangka terwujudnya tata pemerintahan Kecamatan dan Desa yang baik melalui pembuatan website Kecamatan dan Desa.
2. Meningkatkan fasilitasi kegiatan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan danau seluluk.

3. Optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kecamatan dan desa.
4. Peningkatan penegakan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum.
5. Peningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah kecamatan dalam rangka peningkatan akuntabilitas publik.

'C. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan program atau kegiatan instansi akan lebih baik dan terarah.

Rencana Kinerja tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan tercapainya sasaran program pembangunan Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten seruyan guna menunjang keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai, adapun rencana kinerja tersebut adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan secara Prima dan Profesional
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Meningkatkan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan
5. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan Danau Seluluk
6. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Peningkatan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
8. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Rencana Kegiatan Pada Triwulan			
						I	II	III	IV
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat	88,06 %	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.2.851.764.500,-				
				1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.5.999.350,-				
				a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp3.999.350,00,-	√	√		
				b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	00-				
				c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.000.000,-	√	√	√	√
				1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.884.417.474,-				
				a.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.884.417.474,-	√	√	√	√
				b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					
				1.3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 5.000.000,-				
				a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-			√	
				b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-				
				a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 5.000.000,-			√	
				1.4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 393.644.900,-				
				a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.8.108.900	√	√	√	√
				b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.52.891.000,			√	
				c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	√	√	√	√
				d.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.34.998.000				
				e.Penyediaan Barang Cetak dan	Rp.16.499.000	√	√	√	√

				Pengadaan					
				f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	√	√	√	√
				g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp281.148.000,-	√	√	√	√
				1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.512.920.630				
				a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp12.060.000	√	√	√	√
				b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp45.492.750	√	√	√	√
				c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp455.367.880	√	√	√	√
				1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.64.008.600				
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.44.194.100	√	√	√	√
				b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.9.930.000	√	√	√	√
				c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.9.884.500	√	√	√	√
2.			100%	2 Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.31.219.850-				
				2.1 Fasilitas, Rekomendasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.31.219.850-				
				a. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp.7.175.000,-			√	
				b. Fasilitas Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Rp.6.440.350,-			√	
				c. Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-			√	
				d. Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp.10.299.000,-			√	
				e. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	Rp.7.305.500,-			√	
3.			100%	3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.4.999.400,-				

				3.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp.4.999.400,-				
				a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.4.999.400,-	√	√	√	√
4.		Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total desa	100%	4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.20.554.000,-				
				4.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.20.554.000,-				
				a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp.13.773.000,-	√			
				b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp.6.781.000,-	√	√	√	√
			100%	5. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.19.987.250,-				
				5.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.19.987.250,-				
				a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp.9.999.500,-			√	
				b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh masyarakat	Rp9.987.750,-			√	
				6. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp.129.851.000,-				
				6.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.129.851.000,-				
				a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,	Rp.109.861.000,-			√	

				Regional, dan Nasiona					
				b.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Rp.19.990.000.			√	
				TOTAL	Rp.3.072.602.454,-				

Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan 6 (enam) program dan 10 kegiatan, target pagu anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp.3.072.602.454,- dengan realisasi sebesar Rp.2.979.780.574,- sehingga capaiannya adalah sebesar 96,98 %.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Danau Seluluk.

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran. Perumusan Indikator Kinerja Sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja strategis.

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	≥ 100%	Sangat Baik
2	75 – 100 %	Baik
3	55 – 75 %	Cukup Baik

Berdasarkan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Tahun 2025, maka keseluruhan pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2. Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA THN 2025	REALISASI KINERJA THN 2025	CAPAIAN KINERJA THN 2025	KATEGORI CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,06%	88,06%	100	Baik

Selain melakukan pengukuran atas kinerja tahun 2025, kami juga mencoba melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat *progress* capaian per tahun dan

juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel berikut :

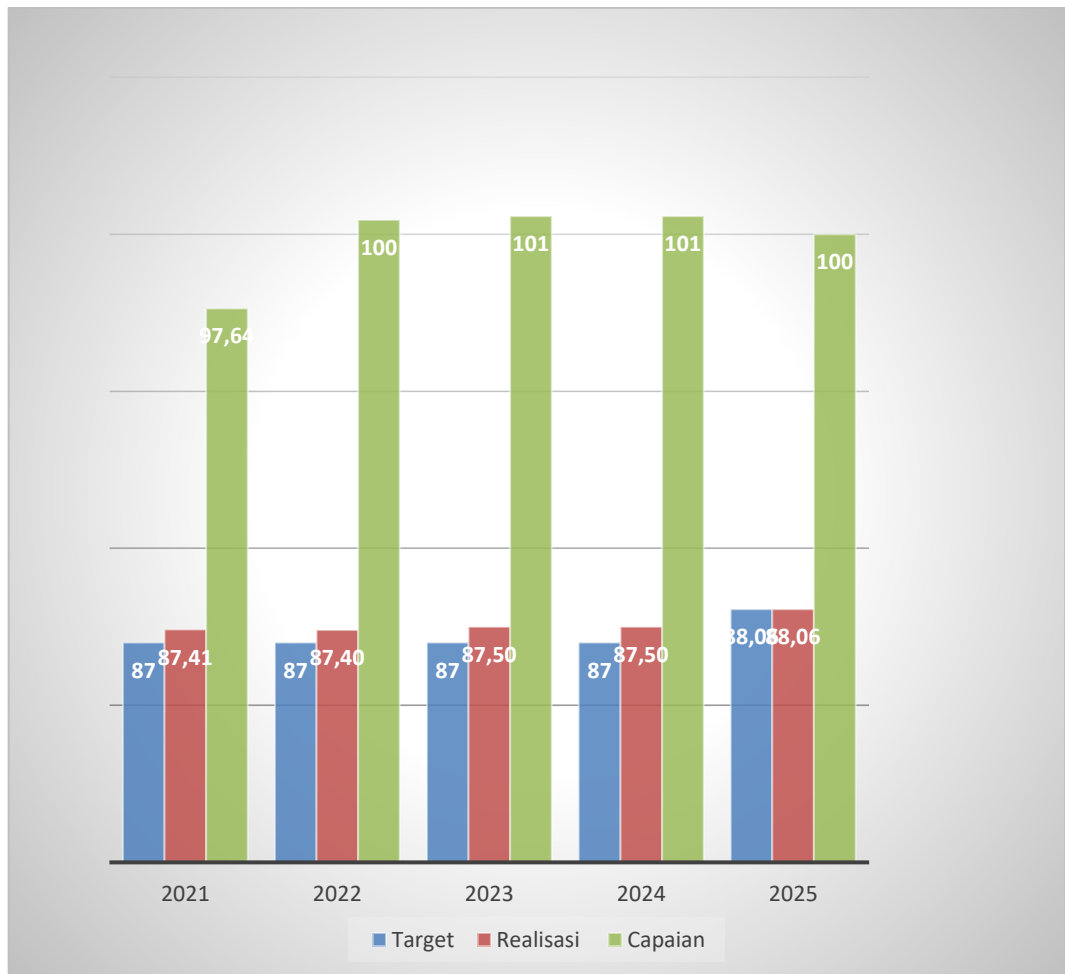
Tabel 3. Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan tahun 2025,2024,2023,2022 dan 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2021
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,06%	88,06%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatkan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan umum pada tahun 2025 sebesar 100% dengan klasifikasi Sangat Baik.

Bagan 1. Perbandingan antara Target Kinerja, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2021,2022,2023,2024 dan 2025



Dari Bagan 1. Perbandingan dari Target tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024. Untuk realisasi Tahun 2020,2021,2022,2023 dan 2024 terjadi peningkatan realisasi sebagai berikut : Realisasi 2020 sebesar 84% , Realisasi 2021 sebesar 87.41%, Realisasi Tahun 2022 sebesar 87.40% dan Realisasi Tahun 2023 sebesar untuk capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 97.67%, 2021 sebesar 100%, 2022 sebesar 100%, 2023 sebesar 100% dan 2024 sebesar 100%.

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategik dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4. Perbandingan Data Kinerja

Indikator Kinerja	Data Awal Kinerja Tahun 2025	Data Kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas pelayanan publik di Kecamatan			
Sasaran 2 : Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum kecamatan			
Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	95%	97.54%	97.54%
Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang difasilitasi	95%	97.54%	97.54%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang diasilitasi	98.96%	95%	95%
Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Paket
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	5 Paket
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7 Paket	5 Paket
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	5 Paket	2 Paket
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	10 Paket	8 Paket
Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	95 Laporan	95 Laporan	98 Laporan
Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	97 %	97 %	90 %
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5 Unit	4 Unit
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	5 Unit	2 Unit
jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	10 Unit	5 Unit
Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diasilitasi	97 %	97 %	98 %
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	3 Orang	4 Orang	3 Orang

Pendidikan dan Pelatihan			
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	6 Orang	4 Orang
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket
Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disajikan	100 %	100%	100 %
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	100%	100%	100%
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bln	14 Org/Bln	14 Org/Bln
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	2 Dokumen	2 Dok	2 Dokumen
Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12,50%	50 %	12,50%
'Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
'Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	1 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen

Batas Desa			
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	0
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan tertangani	95 %	95 %	95 %
Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	95 %	95 %	95 %
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	100%	100%	100%
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 Orang	25 Orang	25 Orang
Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	87%	88,05%
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan

Wilayah Kecamatan			
Persentase terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	62%	62%	95%
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga

Tabel 5. Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target Kinerja Dalam Renstra Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	2	3	4
Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang fasilitasi	100%	100%	100%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%

Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang diasilitasi	95.80%	95.80%	95.80%
Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	83,33
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5 Paket	71,43
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	2 Paket	40%
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10 Dokumen	83,33%
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 Paket	8 Paket	80%
Jumlah laporan penyelenggara aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	154 Laporan	95 Laporan	61,69%
Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100%
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	80%
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	2 Unit	40%
jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	5 Unit	50%
Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diasilitasi	100 %	100 %	100%
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	2 Orang	3 Orang	150%

Pendidikan dan Pelatihan			
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	4 Orang	66,67%
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%
Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disajikan	100 %	100 %	100%
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 %
Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	100%	100%	100%
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bln	14 Org/Bln	100%
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	10%
'Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	6 Laporan	1 Laporan	16,67%
'Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	6 Dokumen	1 dokumen	16,67%

Batas Desa			
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen	0	0%
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	1 Dokumen	16,67%
Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan tertangani	95 %	95 %	90%
Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	95 %	95 %	90%
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1 Laporan	25%
Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	100%	100%	100%
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 Orang	25 Orang	100%
Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	87%	87%	88,05%
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	12 Laporan	100%

Wilayah Kecamatan			
Persentase terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	100 %	100 %	100%
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	2 Laporan	28,57%
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	6 Lembaga	90%

Tabel 6. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	2
Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	94.95%	90%
Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang fasilitasi	94.95%	90%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40.22%	90%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96.79%	90%
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.99%	85%
Persentase Administrasi Umum Perangkat		95%

Daerah Yang diasilitasi	98.15%	
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	68.66%	100%
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	99.83%	83,33
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	99.90%	71,43
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	0	40%
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	83,33%
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	96.64%	80%
Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	99.70%	61,69%
Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	86.68%	90%
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99.47%	80%
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	81.60%	40%
jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	96.58%	50%
Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diasilitasi	100%	95%

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150%	150%
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66,67%	66,67%
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%
Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disajikan	0%	95 %
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	0%	100%
Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0%	100%
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0%	100 %
Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	99.06%	100%
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99.06%	100%
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	0%	100%
Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.13%	10%
'Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	98.60%	16,67%
Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa	69.89%	100%
'Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan	99.85%	16,67%

Batas Desa		
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0%	0%
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	80.49%	16,67%
Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan tertangani	78.01%	25%
Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	78.01%	25%
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	70.45%	25%
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	85.58%	0
Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	96.63%	100%
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	85.58%	100%
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	100%	0

Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88,05%	100%
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.76%	100%
Persentase terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	100%	90%
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0%	28,57%
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	100%

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2025
1	2	3
Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	97.54%	100%
Persentase Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang fasilitas	97.54%	100%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	12 Laporan

Umum Kantor yang Disediakan		
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang diasilitasi	95.80%	95.80%
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7 Paket
Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	5 Paket
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	12 Dokumen
Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 Paket	10 Paket
Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	154 Laporan	154 Laporan
Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	86.68%	100 %
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5 Unit
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	5 Unit
jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	10 Unit
Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diasilitasi	0	100 %
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	2 Orang
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	-	6 Orang

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	1 Paket
Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disajikan	0	100 %
Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat	4 Dokumen	4 Dokumen
Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan
Persentase Administrasi Keuangan yang dilaksanakan	99.06%	100%
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Org/Bln	14 Org/Bln
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	2 Dokumen	2 Dokumen
Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.13%	100 %
'Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	6 Laporan
'Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 dokumen	6 Dokumen
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	6 Dokumen
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	6 Dokumen
Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan tertangani	78.01%	95 %

Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	78.01%	95 %
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4 Laporan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	0
Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	96.63%	100%
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	70 Orang	25 Orang
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	0
Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.76%	87%
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan
Persentase terbentuknya Desa/Kelurahan Mandiri	67.01%	100 %
Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas	0	7 Laporan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga	6 Lembaga

C. REALISASI ANGGARAN (AKUNTABILITAS KEUANGAN)

Realisasi Anggaran Belanja

Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 3.072.602.454,00 yang terbagi dalam berbagai program dan kegiatan terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 3.019.711.454,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.52.891.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.979.780.574,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.926.943.324,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.52.837.250,00 berikut rincian :

Kode	Uraian	Anggaran 2025 (Rp.)	Realisasi 2025 (Rp.)	%
5.	Belanja Daerah	3.072.602.454,00	2.979.780.574,00	96,98
5.1	Belanja Operasi	3.019.711.454,00	2.926.943.324,00	96,93
5.1.1	Belanja Pegawai	1.884.417.474,00	1.866.616.529,00	99,06
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.135.293.980,00	1.060.326.795,00	93,40
5.2.	Belanja Modal	52.891.000,00	52.837.250,00	99,90
5.2.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.166.000,00	25.166.000,00	100
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.725.000,00	27.671.250,00	99,81
	JUMLAH BELANJA	3.072.602.454,00	2.979.780.574,00	96,98

Dari alokasi anggaran belanja yang telah ditetapkan, capaian realisasi yang berhasil dicapai selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp.3.015.492.680,00 atau 95,59% dari Alokasi Anggaran Rp. 3.154.674.000,00 dan Realisasi Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.2.911.117.027,00 atau 97,22% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.994.235.791,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Kode	Uraian	Realisasi 2025 (Rp.)	Realisasi 2024 (Rp.)
5.	Belanja Daerah	2.979.780.574,00	3.015.492.680,00
5.1	Belanja Operasi	2.926.943.324,00	2.995.512.680,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.866.616.529,00	1.693.866.453,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.060.326.795,00	1.301.646.227,00
5.2.	Belanja Modal	52.837.250,00	19.980.000,00
5.2.1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.166.000,00	19.980.000,00
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	27.671.250,00	,00
	Jumlah Belanja	2.979.780.574,00	3.015.492.680,00

Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja Kecamatan Danau Seluluk disesuaikan dengan Dokumen Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Realisasi Anggaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik diKecamatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.865.990.954,00	2.795.492.574,00
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.999.350,00	,00-
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.350,00	,00-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	,00-	,00-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	,00-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.884.417.474,00	1.866.616.529,00

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.884.417.474,00	1.866.616.529,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	,00-	,00-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	,00-
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	,00-	,00-
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	,00-	,00-
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	,00-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.644.900,00	386.381.725,00
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.108.900,00	8.095.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.891.000,00	52.837.250,00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.499.000,00	11.328.000,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	,00-	,00-
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.998.000,00	33.821.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	,00-	,00-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	281.148.000,00	280.300.475,00

				SKPD		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		512.920.630,00	487.010.320,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.060.000,00	11.278.000,00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.254.600,00	39.032.000,00
			39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	480.472.380,00	458.395.770,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		64.008.600,00	55.484.000,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.194.100,00	36.062.000,00
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	,00-	,00-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.884.500,00	9.832.000,00
2.			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan			

			oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.999.400,00	1.938.000,00
3.		Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		20.554.000,00	13.773.000,00
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		20.554.000,00	13.773.000,00
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.773.000,00	13.773.000,00
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.781.000,00	,00-
4.			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		19.987.250,00	15.592.500,00
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		19.987.250,00	15.592.500,00
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	9.999.500,00	7.044.500,00

				Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	9.987.750,00	8.548.000,00
5.			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		129.851.000,00	125.470.000,00
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		129.851.000,00	125.470.000,00
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.990.000,00	19.990.000,00
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal,	109.861.000,00	105.480.000,00

				Regional, dan Nasional		
6.			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		31.219.850,00	31.219.850,00
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		31.219.850,00	31.219.850,00
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.175.000,00	5.775.000,00
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.305.500,00	5.105.500,00
				Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	6.440.350,00	6.350.000,00
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	,00-	,00-
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.299.000,00	10.284.000,00

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama tahun Anggaran 2025, yaitu melaksanakan Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Baik.

Dalam pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan dalam Pencapaian Kinerja selama Tahun Anggaran 2025 sebesar 88.06% (Baik).

2. Saran/Rekomendasi

Adapun saran-saran dari penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat melalui peningkatan mutu dan kualitas pelayanan melalui pelayanan PATEN.
- Mengoptimalkan mutu pelayanan administrasi perkantoran melalui pemanfaatan/optimalisasi ketersediaan anggaran dan perangkat perkantoran.
- Peningkatan SDM aparatur, disiplin aparatur dan adanya uraian tugas yang sesuai dengan Tupoksi.

Asam Baru, 09 Februari 2025



Camat,

SUMANTI, SE., MM

Pembina/IV.a

NIP.19791225 200604 2 034

LAMPIRAN



PENETAPAN KINERJA

FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : **KECAMATAN DANAU SELULUK**
Tahun Anggaran : **2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	
01.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Danau Seluluk	Jumlah Dokumen / Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Dibuat	2 Dokumen
		Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK dan IKU.	7 Dokumen
02.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	88,06%
03.	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	50 %
04.	Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Pelayanan Paten yang dilayani	14 Jenis
		Jumlah Desa yang dimonitoring dan dievaluasi (ADD dn DD)	6 Desa
05.	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Usulan Dokumen Prioritas Kecamatan	1 Dokumen

Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025 :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	BELANJA OPERASIONAL		Sumber Dana APBD
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.865.990.954,00	Sumber Dana APBD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.999.350,00	Sumber Dana APBD
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.999.350,00	Sumber Dana APBD
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	,00-	Sumber Dana APBD
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	Sumber Dana APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.884.417.474,00	Sumber Dana APBD
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.884.417.474,00	Sumber Dana APBD
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	,00-	Sumber Dana APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	Sumber Dana APBD
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	,00-	Sumber Dana APBD
	b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	,00-	Sumber Dana APBD
	a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	Sumber Dana APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.644.900,00	Sumber Dana APBD
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.108.900,00	Sumber Dana APBD
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.891.000,00	Sumber Dana APBD
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.499.000,00	Sumber Dana APBD
	d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	,00-	Sumber Dana APBD

	e.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.998.000,00	Sumber Dana APBD
	f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	,00-	Sumber Dana APBD
	g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.148.000,00	Sumber Dana APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	512.920.630,00	Sumber Dana APBD
	a.Penyediaan jasa komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik	12.060.000,00	Sumber Dana APBD
	b.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.254.600,00	Sumber Dana APBD
	c.Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	480.472.380,00	Sumber Dana APBD
6..	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.008.600,00	Sumber Dana APBD
	a.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	44.194.100,00	Sumber Dana APBD
	b.Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	,00-	Sumber Dana APBD
	c.Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	9.884.500,00	Sumber Dana APBD
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.999.400,00	Sumber Dana APBD
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20.554.000,00	Sumber Dana APBD
	a.Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	20.554.000,00	Sumber Dana APBD
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.773.000,00	Sumber Dana APBD
1..	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.781.000,00	Sumber Dana APBD
	a.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	19.987.250,00	Sumber Dana APBD
	b.Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	19.987.250,00	Sumber Dana APBD
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.999.500,00	Sumber Dana APBD

	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.987.750,00	Sumber Dana APBD
	a.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	129.851.000,00	Sumber Dana APBD
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	129.851.000,00	Sumber Dana APBD
	a.Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	19.990.000,00	Sumber Dana APBD
	b.Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	109.861.000,00	Sumber Dana APBD
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.219.850,00	Sumber Dana APBD
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	31.219.850,00	Sumber Dana APBD
	a.Fasilitas administrasi tata pemerintahan Desa	7.175.000,00	Sumber Dana APBD
	b.Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan	7.305.500,00	Sumber Dana APBD
	c.Fasilitas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	6.440.350,00	Sumber Dana APBD
	d.Fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa	,00-	Sumber Dana APBD
	BELANJA	3.072.602.454,00	Sumber Dana APBD



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
KECAMATAN DANAU SELULUK**

Jalan Jendral Sudirman Km 119 Asam Baru Kode Pos (74271) Propinsi Kalimantan Tengah

ASAM BARU

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2024 yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Intansi Pemerintah.

Atas dasar ini Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2025 Kecamatan Danau Seluluk disusun dengan memuat Kinerja, Permasalahan dan tindaklanjutnya.

Demikian Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Danau Seluluk ini disusun, saran serta masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan selanjutnya.



Asam Baru, 24 Februari 2025

Camat,

SUMANTI,SE.,MM

Pembina Tk.I/IV.b

NIP.19791225 200604 2 034

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah Anggaran berakhir.

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025 adalah suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi indikator, sepenuhnya mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025-2029.

Dari gambaran Rencana Strategis dimaksud, dapat dilihat akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan dengan memperhatikan indikator – indikator yang mempengaruhinya, yaitu : indicator kinerja atau masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), capaian Kinerja (hasil kegiatan yang dilaksanakan) serta capaian akuntabilitas keuangan.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL/GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
C. SUSUNAN ORGANISASI.....	4
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	14
B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA.....	18
C. REALISASI ANGGARAN (AKUNTABILITAS KEUANGAN).....	27
IV. PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Rencana Kinerja Tahun 2025.....	10
Tabel 2 : Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Danau Seluluk Tahun 2025.....	15
Tabel 3 : Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Danau Seluluk Kab. Seruyan Tahun 2021,2022,2023,2024 dan 2025	16
Tabel 4 : Perbandingan Data Kinerja	18
Tabel 5 : Perbandingan Antara Target Kinerja dan Realisasi Kinerja.....	21
Tabel 6 : Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Lalu.....	21
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Renstra	23
Tabel 8 : Realisasi Anggaran Kecamatan Danau Seluluk.....	29

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran I : Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....